

## Kritik Pers: Retret Melemahkan Kemandirian Daerah

REKAN sesama media, baliberkarya.com, dari Denpasar, Senin 24/2 kemarin melansir suara berbeda untuk mengkritisi agenda retret pemerintah pusat yang diikuti ratusan KDh (kepala daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di Akmil Magelang, dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Bila pemerintah pusat mengklaim pembekalan kepada para KDh yang baru dilantik di Jakarta Kamis 20/2, itu, untuk membentuk sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pusat-daerah demi kepentingan rakyat, maka liputan baliberkarya.com justru menyebutnya tindakan mengkooptasi daerah otonom, sekaligus siasat mengendalikan daerah agar memerintah persis seperti keinginan pusat. Pada hal, dari segi politik, sejatinya tak ada beda antara para KDh dengan presiden, kecuali skala wilayah pemerintahannya lebih kecil, sebab sama-sama dipilih

oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, bukan ditunjuk sebagaimana halnya anggota kabinet presiden.

Suara berbeda itu, perlu juga diketahui pembaca sebagai pembandingan, untuk memperkaya khazanah - red.

\* RETRET pembekalan KDh (kepala daerah) 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang terus menjadi sorotan tajam, apalagi acara ini dikritik karena digelar di tengah efisiensi anggaran.

Pasalnya, biaya yang digunakan untuk retret ini tidak transparan, sementara daerah-daerah di Indonesia tengah menghadapi pemangkasan anggaran dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.

\* Polemik semakin menguat setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas me-

mintanya seluruh KDh dari partainya memboikot kegiatan tersebut.

Langkah Mega ini bukan tanpa alasan. Retret KDh yang digelar Presiden Prabowo dituding sejumlah pihak bukan sekadar ajang silaturahmi atau koordinasi teknis.

Ini adalah strategi politik terselubung untuk membangun hierarki kekuasaan baru, di mana KDh yang seharusnya otonom ditempatkan sebagai bawahan yang wajib berhadapan dengan pusat.

Dengan cara ini, pemerintahan daerah tidak lagi memiliki independensi penuh dalam menjalankan mandat rakyat, tetapi dipaksa tunduk pada skema yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam sistem pemilihan langsung, KDh memiliki mandat rakyat yang sejajar dengan presiden, hanya berbeda dalam skala wilayah.

Retret semacam ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi desentralisasi yang menjadi roh Reformasi 1998.

\* Desentralisasi telah terbukti meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberikan kebebasan inovasi dalam pelayanan publik. Ketika KDh diposisikan sebagai subordinat (bawahan, lebih rendah --google), maka kreativitas daerah dalam mencari solusi akan terkekang.

\* Skema ini mirip dengan pola Orde Baru yang ingin mengendalikan KDh. Sementara, KDh punya basis kekuatan dan jaringan patronasenya sendiri. Mereka bukanlah menteri yang bisa di-remote dari Jakarta. Dengan memaksa mereka hadir dalam forum tertutup, ada upaya untuk menguji sejauh mana KDh bisa dikooptasi atau di-breakdown independensinya.

Jika retret ini menjadi rutinitas tahunan, maka pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin kuat, membayangi independensi KDh yang seharusnya bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya.

\* Retret ini bukan sekadar forum pembekalan, melainkan investasi politik jangka panjang untuk Pemilu 2029. Ada tiga agenda tersembunyi, yakni: mengidentifikasi loyalis dan penentang; membentuk mesin politik di tingkat tapak; dan meredam potensi oposisi daerah. Dalam politik, loyalitas KDh sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang kandidat di tingkat nasional.

Dengan menempatkan KDh dalam posisi tunduk, pemerintah pusat akan lebih mudah mengamankan jaringan politik yang bisa digunakan dalam kontestasi mendatang. Jika kegiatan semacam ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat serius. Sentralisasi kekuasaan akan mengikis hak-hak daerah dalam menentukan kebijakan sendiri. Lebih parah lagi, sentralisasi ini akan memperlebar jurang ketimpangan. (dinukil dari laman baliberkarya.com).



## Penguasa Zalim

Dari Halaman 1

Al-Qur'an jauh mengingatkan: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Penguasa zalim tersebut juga tidak menegakkan keadilan. Pemimpin yang tidak adil dalam mengambil keputusan, berpihak pada kelompok tertentu, atau menindas rakyat kecil. Contoh: Diskriminasi dalam hukum, memberi keuntungan hanya kepada pendukungnya, atau menindas kelompok yang berbeda pandangan.

Nabi Muhammad Saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka dan dalam keluarga mereka serta dalam kepemimpinan mereka." (HR. Muslim)

Penguasa zalim juga cenderung menindas dan menzalimi rakyat. Menggunakan kekerasan, intimidasi, atau hukum yang tidak adil untuk menekan rakyatnya. Contoh: Penguasa yang menahan kebebasan berpendapat, menindas rakyat dengan pajak yang berat, atau menggunakan militer/polisi untuk membungkam kritik.

Al-Qur'an mengingatkan: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Ali Imran: 140)

Penguasa zalim juga cenderung mengabaikan hak-hak dasar rakyatnya seperti kebebasan, kesejahteraan, dan keamanan. Contoh: Mengabaikan kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, pangan), memenjarakan orang tanpa alasan yang sah, atau melakukan pembunuhan terhadap lawan politik.

Pada Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan: "Seorang pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim)

Penguasa zalim juga tidak mau menerima kritik atau nasihat, menganggap dirinya selalu benar, dan menindas orang yang berani menegur. Contoh: Melarang kebebasan pers, menangkup orang yang berbicara kritis, atau menganggap dirinya sebagai pemimpin yang tidak bisa salah. Kisah dalam Islam: Fir'aun adalah contoh penguasa zalim yang menolak nasihat Nabi Musa dan menindas Bani Israil.

Penguasa zalim adalah mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, menindas rakyat, melanggar hak asasi manusia, dan menolak kritik. Dalam Islam, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman dengan cara yang benar.

Islam mengajarkan bahwa menghadapi penguasa zalim harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan: 1. Menegur dan Memberikan Nasihat dengan Hikmah

Dalam Islam, menasihati penguasa yang zalim adalah bentuk jihad tertinggi, sebagaimana dalam hadis: "Seutama-utama jihad ialah mengucapkan kalimat yang menuntut keadilan di hadapan seorang sultan yang menyeleweng." (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

Nasihat bisa diberikan melalui berbagai cara, seperti dialog langsung, surat terbuka, atau melalui ulama yang memiliki pengaruh. Contoh sejarah: Imam Ahmad bin Hanbal tetap menasihati penguasa yang menindas meskipun ia harus dipenjara dan disiksa.

Jika nasihat tidak didengar, rakyat dianjurkan untuk tetap bersabar dan berdoa kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan: "Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah." (HR. Bukhari & Muslim)

Jika memungkinkan, rakyat dapat menggunakan jalur hukum atau mekanisme demokrasi (demonstrasi damai, petisi, atau pemilihan umum) untuk mengoreksi penguasa zalim. Dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Jika penguasa zalim tetap bertahan, rakyat perlu memperkuat kesadaran kolektif melalui pendidikan, dakwah, dan gerakan sosial. Contohnya meningkatkan literasi politik agar rakyat tidak mudah dibodohi. Menggalang solidaritas untuk membantu rakyat yang tertindas.

## MK Batalan Kemenangan Istri Menteri .....

Dari Halaman 1

"Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang," kata Hakim Konstitusi

Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusan, Senin (24/2).

Atas dasar itu, majelis hakim konstitusi meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

MK pun membatalkan PKPU No. 2028

Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang 2024.

MK juga meminta KPU Kabupaten Serang menggelar pemungutan suara ulang dengan tenggat waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan. (cnni/js)

## 18 Kepala Daerah PDIP Bergabung Retreat .....

Dari Halaman 1

yang lain, termasuk yang kemudian ya kalau sudah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik aja, bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan ya, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini, ya," kata Pram.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu

yang terlihat bersama rombongan Pram cs sementara itu juga menyebut masih ada kepala daerah dari PDIP yang belum menyusul bergabung ke Akmil.

"Kecuali Bali ya," kata Masinton.  
"(Alasan) enggak tahu tanya di Bali. Teman-teman Bali, mereka masih di Jogja," ujarnya.  
Sementara menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Kompleks retreat Akmil, Senin (24/2/2025) pagi, sebanyak 17 dari

55 kepala daerah dari PDIP dikabarkan telah bergabung dalam kegiatan retreat Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam.

"Jam 9-an (malam), jumlahnya ada 17. Semua dari PDIP," kata Tito.

Tito mengatakan, tak ada arahan khusus bagi 17 orang ini, sekalipun mereka tak mengikuti kegiatan retreat dari hari pertama. (cnni/js)

## Pramono Anung Ikut Retret .....

Dari Halaman 1

DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama."

Dalam kalimat langsung atau lurus (stright) ciri khas pers, Pramono seakan mengatakan, sebagai kader mereka sebenarnya sudah memenuhi instruksi-tunda hadir dari Ketum Megawati, karena baru masuk pada hari keempat, dan proses kehadiran mereka kemudian pun sudah melalui diskusi dengan Mega dan petinggi partai.

Kehadirannya bersama beberapa kader PDIP, menurut dia, dengan berbagai pertimbangan yang

sesungguhnya apa yang menjadi arahan untuk melakukan penundaan.

"Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini," kata Pramono.

Pram --sapaannya-- adalah kolega sesama pejabat setingkat menteri pada era pemerintahan Jokowi. Pram sebagai Seskab, sedangkan Prabowo Menhan.

**TITIP JAKARTA KE BANG DOEL**  
Sebagai Gubernur Jakarta, dia sudah menitipkan tugas kepada Bang Doel (Wakil Gubernur

Jakarta Rano Karno) untuk terus gas pol mengerahkan pasukan biru, oranye, hijau, dan pasukan kuning terkait dengan harapan masyarakat Daerah Khusus Jakarta.

"Terutama saya pribadi, oleh rakyat Jakarta, jadi itu yang ingin saya sampaikan," katanya.

Menurut dia, yang mungkin belum tinggal satu provinsi, ada satu provinsi karena arahan Mendagri maupun Wamendagri boleh mengusulkan sekda. "Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini," katanya. (Antara - cp).

## Konflik dengan PDIP Perburuk Relasi .....

Dari Halaman 1

Jerman, itu, berpendapat, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemicu utama, karena Hasto sebagai Sekjen tidak sekadar marwah partai setelah Ketua Umum, tapi juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Ketum Megawati Soekarnoputri (78).

Maka, tak heran bila dampak penahanan tersebut mengakibatkan krisis yang membuat hubungan pemerintah daerah dan pusat, tegang. Terlebih lagi, ada 55 KDh (kepala daerah) dan wakilnya hasil pilkada 2024 yang berasal dari PDIP.

**GANGGU**

Selain itu, Wahid menilai, pada saat ini Presiden Prabowo sedang melakukan pendisiplinan perencanaan pembangunan dan program pemerintah. Menurut dia, hal tersebut berpotensi mengganggu atau tidak berjalan maksimal karena adanya krisis politik yang dapat mengganggu relasi pemerintah daerah dan pusat.

"Krisis juga berpotensi mengganggu dinamika relasi pusat-daerah, khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan kuat fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio ketergantungan keuangan)," kata pengajar di departemen ilmu politik dan pemerintahan itu.

"Bagaimanapun ada variabel politik yang berpengaruh kuat terhadap distribusi program pemerin-

tah pusat di daerah," sambungnya.

**FIGUR JEMBATAN**

Lebih lanjut Wahid menekankan, saat ini perlu ada figur dan rencana khusus untuk bisa menjembatani dan mengantisipasi daya rusak dari krisis politik yang terjadi.

Menurutnya, perbaikan dinamika hubungan antara Prabowo dan Megawati akan menjadikan harapan untuk bisa mengakhiri krisis.

"Jika tidak segera dimitigasi, berpotensi mengakibatkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan yang baik antara Bu Mega dan Presiden Prabowo menjadi salah satu variabel harapan berakhirnya krisis ini," pungkasnya. (mediaindonesia / undip)

## Instruksi Mega soal Retret Masih Tetap .....

Dari Halaman 1

semua KDh dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen Hasto Kristiyanto (58) ditahan KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis 20/2, ditandatangani dan diberi cap stempel.

"Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)" kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24/2.

Perihal KDh yang nekat hadir retret atau membangkang, Hugo enggan menanggapi. "Kita lihat nanti," jawabnya singkat.

**ABSEN**

Meski diundang KDh terpilih dan dilantik di Istana Negara, baru-baru ini, ada yang tidak hadir mengikuti retret, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya.

Namun, yang disorot adalah KDh asal PDIP. Hal ini karena, instruksi Ketum Megawati Soekarnoputri meminta seluruh KDh dari partainya untuk tidak mengikuti retret KDh tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan Sekjen Hasto oleh KPK terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis 20/2. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum

bergabung ke koalisi pemerintahan.

**DAMPAK BESAR**

Hal ini diamini analisis komunikasi politik Hendri Satrio. Dia melihat instruksi Mega memberikan dampak besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Perintah Mega berpotensi membuat KDh dari PDIP tidak tegak lurus pada Presiden Prabowo. "Jelas berpengaruh terhadap pemerintahan Pak Prabowo, karena ini instruksi bukan main-main. Banyak juga kepala daerah yang memang berada di bawah panjinya PDIP," ujar Hendri, Jumat 21/2.

"Kemudian apakah persepsinya jadi buruk antara hubungan Megawati dengan Prabowo, ya tentu saja. Karena ini kan dianggap menolak instruksi dari negara," pendiri Ibmaga sSurvei KedaiKOPI itu menambahkan. (lip6).

## Ayo Nantikan Hari Tanpa Bayangan .....

Dari Halaman 1

tetapi sudah bermula pada Kamis 20/2 pekan lalu di Baa, ibukota Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fenomena HTB akan berlangsung secara berurutan di wilayah sekitar lintasan garis khatulistiwa atau equator.

Khatulistiwa adalah garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan selatan.

Garis khatulistiwa memiliki nilai lintang 0 derajat. Sejumlah kota di Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa, di antaranya: Pontianak (Kalbar); Santan Hulu (Kaltim); Bonjol, Pasaman, dan Koto Alam (Sumbar); Pangkalan Lesung dan Lipat Kain (Riau); Tinombo Selatan (Sulteng); Tanjung Teludas (Kepri); dan Kayoa (Maluku Utara).

Di seputar kawasan lintasan gairs khatulistiwa itulah terjadi fenomena HTB.

**HTB**

Fenomena HTB terjadi ketika matahari berada pada titik tertinggi di langit --juga dikenal sebagai transit atau istiwah'. Fenomena ini terjadi secara berurutan di wilayah Indonesia, terutama

di sekitar garis khatulistiwa.

Fenomena ini terjadi saat deklinasi atau jarak sudut matahari, sejajar dengan garis lintang pengamat, maka fenomena inilah yang disebut kulminasi utama.

Pada momen tersebut, matahari berada tepat di atas kepala pengamat yang berdiri tegak, atau di titik zenit.

Akibatnya, bayangan dari objek yang berdiri tegak itu, tak tampak alias menghilang, karena bertumpuk pada benda itu sendiri. Oleh karena itu, hari kulminasi utama, sering disebut sebagai hari tanpa bayangan atau HTB.

Fenomena ini tidak berdampak langsung terhadap cuaca maupun iklim di Indonesia. Namun, masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan paparan sinar ultraviolet (UV).

**FEBRUARI**

Untuk periode awal, Februari 2025, wilayah yang paling dahulu mengalami fenomena HTB adalah Baa --ibukota Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yakni pada Kamis 20 Februari 2025, pekan lalu pukul 11.59.08 wita dan juga di Seba.

Baru kemudian, Maret dan kemudian April, diikuti diikuti wilayah lain juga di NTT, Bali, NTB, Jawa Timur, Maluku, Di Yogyakarta,

dan Jawa Tengah. Wilayah terakhir perlintasan adalah Sabang, Aceh, pada Jumat 4 April 2025 --kemungkinan hari ke-4 lebaran Idulfitri 1446 H.

"Secara umum, kulminasi utama tahun 2025 di Indonesia terjadi antara 20 Februari 2025 di Baa, hingga 4 April 2025 di Sabang, Aceh," demikian bunyi keterangan tertulis BMKG.

**MEDAN-PEKANBARU-PADANG-ACEH**

Berdasarkan laporan UMSU, jadwal HTB di Medan terjadi pada Sabtu 29 Maret 2025, pukul 12.30.00 wib, pada pengujung bulan puasa Romadhon atau dua hari sebelum hari raya Idulfitri 1 Syawal 1446 H, serta bertepatan pula dengan hari libur Nyepe rakyat baru Saka 1947.

Tetapi sebelumnya, pada Jumat 21 Maret pukul 12.21.21 wib, lebih dahulu terjadi di Kota Pekanbaru, Riau.

Baru kemudian, pada Senin 24 Maret pukul 12.26.35 wib, terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sepuluh hari setelahnya, Kamis 3 April pukul 12.42.00 wib, pada hari ke-3 lebaran Idulfitri, terjadi di Kota Bandaaceh. Menurut BMKG, hari terakhir HTB terjadi di Kota Sabang pada Jumat 4 April 2025. (detikcom/wiki-pedia/oif umsu-cp).